RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
RENCANA KERJA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

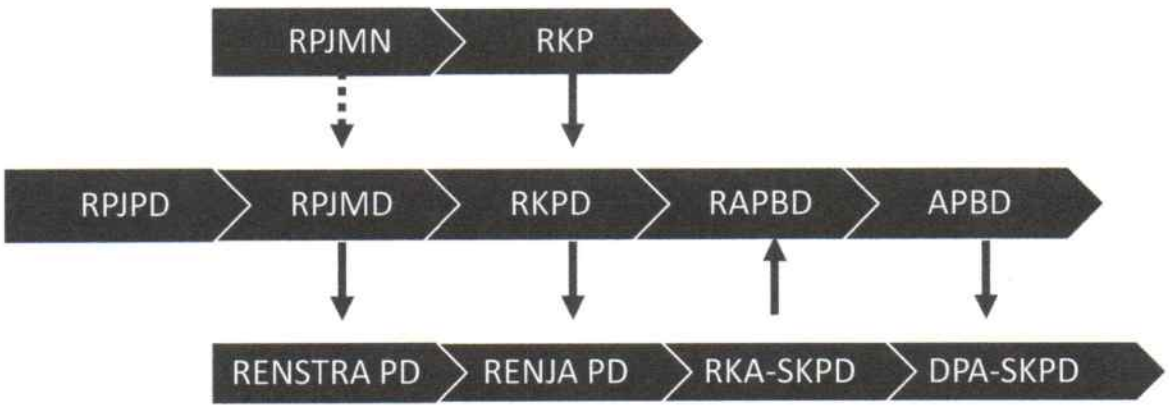
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

- ⋯→ diperhatikan
- D dipedomani dan/atau diacu
- ⟶ dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-3 (ketiga) periode tahun 2026; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan	82	86	80	69.25	86.56%	81,5	69.25	83%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.01	0001	Penyusunana dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. sawahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%

7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Peerubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann	2 laporan	2 Laporan	2 laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100.00%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	14 bulan	22 Orang/Bulan	14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	114%	14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	114.29%
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	22 Paket	0.00	0.00	0.00	22 Paket	0.00	0.00%
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	6 Orang	100.00%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100.00%
7	01	01	2.06	0003	Penyediaaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	-	8 Paket	100.00%

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100.00%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100.00%
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
7	01	01	2.06	0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0%	6 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100.00%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	0	2 Unit	100.00%
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100.00%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang	12 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	12 Bulan	12 Unit	18 Unit	100%	12 Unit	18 Unit	100.00%

7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100.00%
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100.00%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100.00%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100.00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	100%	83%	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100.00%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Laporan	6 Kegiatan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100.00%
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100.00%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinerg Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 Dokumen	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Dokumen	2 Kegiatan	100.00%
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%

7	01	02	2.04		Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2 Laporan	1 Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100.00%
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
7	01	02	2.04	0003	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	100.00%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan	100%	15 Kegiatan	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100.00%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Kegiatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	100%	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00%
7	01	04			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100.00%
7	01	04	2.01		PROGRAM KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	3 Laporan	3 Kegiatan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100.00%

7	01	04	2.01	0001	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100.00%
7	01	05			Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan	100%	4 kegiatan	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100.00%
7	01	05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	440 Orang	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	100%	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakt	100.00%
7	01	05	2.01	0001	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	440 orang	440 Orang	440 orang	440 orang	100%	440 orang	440 orang	100.00%
7	01	06			Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan	100%	15 Kegiatan	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100.00%
7	01	06	2.01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang	9 Desa	9 Desa/kelurahan	9 Desa/kelurahan	9 Desa/kelurahan	100%	9 Desa/kelurahan	9 Desa/kelurahan	100.00%
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumem	3 Dokumen	100%	3 Dokumem	3 Dokumen	100.00%
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**86,56%**	**Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terselesaikannya semua dokumen dan administrasi penunjang urusan pemerintahan	Tercapainya target kinerja	Konsisten dan selalu memperhatikan rencana kerja dan anggaran
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**100%**	**Sangat tinggi**

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kas	Tercapainya target kinerja sesuai rencana	Konsisten dan selalu memperhatikan rencana kerja dan anggaran kas
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**100%**	**Sangat tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kas	Tercapainya target kinerja sesuai rencana	Konsisten dan selalu memperhatikan rencana kerja dan anggaran kas
Program Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**100%**	**Sangat tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kas	Tercapainya target kinerja sesuai rencana	Konsisten dan selalu memperhatikan rencana kerja dan anggaran kas
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**100%**	**Sangat tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kas	Tercapainya target kinerja sesuai rencana	Konsisten dan selalu memperhatikan rencana kerja dan anggaran kas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**100%**	**Sangat tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kas	Tercapainya target kinerja sesuai rencana	Konsisten dan selalu memperhatikan rencana kerja dan anggaran kas

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan

indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Thn. 2022	Thn. 2023	Thn. 2024	Thn. 2025	Thn. 2022	Thn. 2023	Thn. 2024	Thn. 2025
1.	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	100%	100%	100%	100%	96%	98%	100%	100%
2.	Presentase pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)	100%	100%	100%	100%	94%	85%	97%	92%

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sawahan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Sawahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sawahan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Sawahan adalah "Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan".

Tabel 2.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sawahan

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai	81	83,71

Sumber : Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2024 – 2026

Capaian ini berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 100/2820/411.000/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2024.

Pencapaian nilai Indeks Sinergitas Penilaian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Administrasi berdasarkan upload data dukung dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan Penilaian Indikator Manajerial ASN di Kecamatan.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dana mengukur untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Sawahan adalah :

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sawahan

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	81	89,42

2	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	100	100

Dalam indikator kinerja kunci Kecamatan Sawahan, indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) pada Triwulan III tahun 2024 mencapai 89,42. Pencapaian diperoleh dengan melaksanakan pelayanan yang baik bagi Masyarakat meskipun terdapat hambatan berupa Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi

semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.1 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

a. Kecamatan Sawahan jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Sawahan.
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sawahan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (Good Governance)
f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sawahan

Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sawahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Sawahan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Sawahan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sawahan;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sawahan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sawahan;

g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Sawahan. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa; Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sawahan. Seperti PKH/BLT dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.2 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

1. P*emanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2. *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk

sungguh–sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4 *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5 *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan* Desa *yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat* Desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah **"PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan

analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Sawahan	Nilai SAKIP Kecamatan	82	Rp 3,058,208,312	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Kecamatan Sawahan				Rp 3,135,035,384	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70,5	Rp 3,135,035,384	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	Rp 1,200,000	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang Ditetapkan*			*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang Ditetapkan*	*Dokumen*	3	Rp 212,000	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Kec. Sawahan)	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 200,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp 212,000	
Tersusunanya dokumen pengganggaran Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah dokumen pengganggaran Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)*			*Tersusunanya dokumen pengganggaran Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah dokumen pengganggaran Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)*	*Dokumen*	4	Rp 848,000	

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000	
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	Rp 200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000	
Koordinasi dan penyusunan dokumen DKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 200,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000	
Kordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DKA SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 200,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000	
Tersusunnya data kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah data kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)*			*Tersusunnya data kinerja Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah data kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)*	*Dokumen*	2	Rp 212,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Rp 200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Rp 212,000	

Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)*			*Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)*	*Laporan*	2	Rp 348,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	Rp 348,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	Rp2,774,705,762	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sawahan	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*			*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/ bulan*	16	Rp 2,744,634,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Rp2,773,305,762	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sawahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	16	Rp 2,744,634,000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*			*Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	*Laporan*	13	Rp 11,156,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 686,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	Rp 200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	12	Rp 10,470,000	

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan				*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun*			*Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun*	*Laporan*	13	Rp 6,348,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Rp 6,174,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	Rp 174,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 15,596,400	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Tersedianya perlengkapan pegawai perangkat daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah perlengkapan pegawai perangkat daerah yang disediakan*			*Tersedianya perlengkapan pegawai perangkat daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah perlengkapan pegawai perangkat daerah yang disediakan*	*Paket*	0	Rp -	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Rp 9,596,400	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	Rp -	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Pegawai	6 Orang	Rp 6,000,000		Kantor Kecamatan Sawahan					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp 28,225,750	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan*			*Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan*	*Paket*	5	Rp 78,803,412	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	Rp 2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1,246,750	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	Rp 3,370,050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1,234,850	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 5,635,700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 74,487,812	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Barang	2 Paket	Rp 3,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Rp 1,834,000	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun*			*Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun*	*Laporan*	14	Rp 27,145,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	Rp 3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1	Rp 6,000,000	

							Undangan yang Disediakan				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan	12 Laporan	Rp 9,020,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 17,345,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	Rp 1,200,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Rp 3,800,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	6 Unit	Rp 17,350,000	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan*			*Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan*	*Unit*	2	Rp 26,073,872	
Pengadaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	Rp -	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Unit Peralatan dan	4 Unit	Rp 17,350,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	Rp 26,073,872	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 Laporan	Rp 34,200,000	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun*			*Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun*	*Laporan*	24	Rp 29,925,000	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp 1,125,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	Rp 33,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 28,800,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	Rp 137,930,400	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*			*Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*	*Unit*	15	Rp 209,330,100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	Rp 40,003,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	Rp 48,075,700	
Pemeliharaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Mebel yang	5 Unit	Rp 3,502,000	Pemeliharaan Mebel	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	Rp 3,014,500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Rp 22,650,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	Rp 7,090,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Gedung Kantor dan	4 Unit	Rp 71,775,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	Rp 151,149,900	

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Kegiatan	100%	Rp 116,735,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Kecamatan Sawahan				Rp 221,430,400	
Meningkatnya efektifitas koordinasi pemerintahan di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan dikecamatan			Meningkatnya efektifitas koordinasi pemerintahan di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan dikecamatan	%	100	Rp 110,715,200	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi	6 Laporan	Rp 109,805,000	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Kantor Kecamatan Sawahan	*jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor*			*Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor*	Kantor Kecamatan Sawahan	*jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor*	*Laporan*	16	Rp 110,715,200	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	Rp 109,805,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	8	Rp 95,874,400	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	Rp 14,840,800	
Meningkatnya efektifitas koordinasi pelayanan publik di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pelayanan publik dikecamatan			Meningkatnya efektifitas koordinasi pelayanan publik di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pelayanan publik dikecamatan	%	100	Rp 13,840,800	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan				*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat*			*Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat*	*Laporan*	1	Rp 13,840,800	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	Rp 13,840,800	
Meningkatnya efektifitas koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan			Meningkatnya efektifitas koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	%	100	Rp 5,545,400	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	Rp 5,000,000	*Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum*			*Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum*	*Laporan*	1	Rp 5,545,400	

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	Rp 5,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	Rp 5,545,400	
Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan	2 Laporan	Rp 1,930,000		Kantor Kecamatan Sawahan					
Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Rp 965,000		Kantor Kecamatan Sawahan					
Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Rp 965,000		Kantor Kecamatan Sawahan					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Lembaga	100%	Rp 51,670,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Kecamatan Sawahan				Rp 112,210,600	
Meningkatnya efektifitas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan			Meningkatnya efektifitas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	%	100	Rp 112,210,600	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga	15 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 51,670,000	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Kantor Kecamatan Sawahan					

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan*			*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan*	*Lembaga Kemasyarakatan*	5	Rp 79,238,200	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga	8 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 35,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Lembaga Kemasyarakatan*	5	Rp 79,238,200	
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah laporan musyawarah perencanaan pembangunan yang difasilitasi*			*Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah laporan musyawarah perencanaan pembangunan yang difasilitasi*	*Laporan*	16	Rp 32,972,400	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen	15 Dokumen	Rp 16,670,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	16	Rp 32,972,400	
PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase	100%	Rp 120,067,800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Sawahan				Rp 102,813,900	
Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum			Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	Rp 102,813,900	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Lembaga/Organisasi	4 Lembaga / Organisasi Masyarakat	Rp 120,067,800	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan*			*Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan*	*Orang*	200	Rp 102,813,900	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang yang	440 orang	Rp 120,067,800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	Rp 102,813,900	
PROGRAM KETENTRAMAN KETERTIBAN, DAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Permasalahan	100%	Rp 21,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Kecamatan Sawahan				Rp 20,986,200	
Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan			Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan	%	100	Rp 20,986,200	

ketertiban umum di kecamatan		ketertiban umum di kecamatan					ketertiban umum di kecamatan				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil	3 Laporan	Rp 21,000,000	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*			*Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	*Laporan*	4	Rp 20,986,200	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil	3 Laporan	Rp 21,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	Rp 20,986,200	
Meningkatnya efektifitas koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan			Meningkatnya efektifitas koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	%	100	Rp -	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan				*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada di kecamatan*			*Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada di kecamatan*	*Laporan*	0	Rp -	

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	Rp -	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100%	Rp 59,567,500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Kecamatan Sawahan				Rp 23,556,600	
Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa dengan tertib administrasi kelembagaan desa			Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa dengan tertib administrasi kelembagaan desa	%	100	Rp 23,556,600	
Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	9 Desa	Rp 59,567,500	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Administrasi kelembagaan desa	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Dokumen Administrasi kelembagaan desa*			*Terlaksananya fasilitasi penyusunan Administrasi kelembagaan desa*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Dokumen Administrasi kelembagaan desa*	*Dokumen*	6	Rp 23,556,600	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	3	Rp 6,170,400	
Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	Rp 15,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	3	Rp 17,386,200	

6

Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa			Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Persentase Desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	Rp 32,222,400	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan				*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Kantor Kecamatan Sawahan					
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi*			*Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa*	Kantor Kecamatan Sawahan	*Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi*	*Dokumen*	9	Rp 32,222,400	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	Rp 32,567,500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9	Rp 32,222,400	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp 12,000,000		Kantor Kecamatan Sawahan					

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2026

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**

Prioritas RKP 2026 difokuskan pada dua klaster utama yaitu kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Hal ini mencakup berbagai program seperti optimalisasi Bulog, pembangunan lumbung pangan, peningkatan energi terbarukan, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, RKP 2026 juga menekankan pada reformasi birokrasi, deregulasi, dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	83

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	82
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	10
Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	88

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2026, yaitu **"Peningkatan Daya Saing Daerah Dan Transformasi Pelayanan Publik"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Daerah, swasembada pangan dan air, serta perluasan lapangan pekerjaan
2. Mendorong Daya Saing daerah dan Produktivitas Sektor potensial berbasis ekonomi digital
3. Pemerataan pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan serta Kemandirian Desa.
5. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia yang unggul, sehat, cerdas dan berdaya saing, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan sosial masyarakat.

6. Peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah, dan infrastruktur layanan dasar.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengembangan digitalisasi pelayanan public dan administrasi pemerintahan.
8. Peningkatan Kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya serta ketahanan daerah

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SAWAHAN KAB. NGANJUK
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SAWAHAN						**3.556.926.484,00**							**3.586.074.508,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.556.926.484,00**							**3.586.074.508,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.556.926.484,00**							**3.586.074.508,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Kecamatan***	-			**82 Nilai**	**3.135.035.384,00**						-	**3.012.144.758,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	1.272.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PO 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	1.872.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	212.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		312.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	212.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		312.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	212.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		312.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	212.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		312.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	212.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Kab. Nganjuk		312.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	212.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Penngkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		312.000,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			14 Dokumen	2.755.790.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	2.453.416.108,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.744.634.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		2.436.261.758,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	686.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		1.650.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.470.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		13.484.350,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	7.795.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyakudupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	89.100.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	7.795.400,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyakudupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		89.100.000,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	95.678.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	142.694.800,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.246.750,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		7.209.500,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.408.850,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		4.000.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.521.600,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		82.650.300,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.356.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelodupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		5.495.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelodupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		7.000.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggarasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	14.345.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggarasan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		26.440.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggarasan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		9.900.000,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan*	-			2 Unit	35.244.684,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	70.431.950,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.244.684,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		70.431.950,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	29.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kab. Nganjuk	-	31.100.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.125.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kab. Nganjuk		1.300.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PO 7 : Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		29.800.000,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara*	-			15 Unit	209.330.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	243.529.900,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	48.075.700,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		57.889.400,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	3.014.500,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		2.332.200,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	7.090.000,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		22.400.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	151.149.900,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PO 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		160.908.300,00	KECAMATAN SAWAHAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib***	-			**100 %**	**130.101.400,00**						-	**136.325.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			8 Laporan	95.574.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PO 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	99.075.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	95.874.400,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		99.675.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	-			1 Dokumen	5.545.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	6.550.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	5.545.400,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		6.650.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat*	-			2 Laporan	28.661.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	30.700.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang lainnya dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	13.940.900,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggarasan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		14.850.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	14.940.900,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggarasan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		15.850.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan***	-			**100 %**	**112.210.600,00**						-	**114.275.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan*	-			5 Lembaga Kemasyarakatan	112.216.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaras n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	114.275.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	79.298.200,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaras n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		80.275.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

b

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				16 Dokumen	32.972.400,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		34.000.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani***	-			**100 %**	**20.986.200,00**						-	**22.150.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			3 Laporan	20.986.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	22.150.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	20.986.200,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		22.150.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan***	-			**100 %**	**102.813.900,00**						-	**224.904.750,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan*	-			4 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	102.813.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	224.904.750,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	102.813.900,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		224.904.750,00	KECAMATAN SAWAHAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang***	-			**100 %**	**55.779.000,00**						-	**76.275.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	-			9 Desa/Kelurahan	55.779.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	76.275.000,00	KECAMATAN SAWAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	32.222.400,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		38.050.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	6.170.400,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		13.650.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	17.386.200,00	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		24.575.000,00	KECAMATAN SAWAHAN
	JUMLAH							3.556.926.484,00							3.586.074.506,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	83	Rp 3,556,926,484

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	82	Rp 3,377,347,384
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	10%	Rp 123,800,100
3.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	88%	Rp 55,779,000

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif
	Uraian (Output)	Satuan	Target	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70,5	Rp 3,135,035,384
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang Ditetapkan*	*Dokumen*	3	Rp 212,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp 212,000
Tersusunanya dokumen pengganggaran Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pengganggaran Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)*	*Dokumen*	4	Rp 848,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 212,000
Tersusunnya data kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah data kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)*	*Dokumen*	2	Rp 212,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Rp 212,000
Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)*	*Laporan*	2	Rp 348,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	Rp 348,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	16	Rp 2,744,634,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	Rp 2,744,634,000
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	*Laporan*	13	Rp 11,156,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 686,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 10,470,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				

Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun*	*Laporan*	13	Rp 6,348,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Rp 6,174,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	Rp 174,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Tersedianya perlengkapan pegawai perangkat daerah	*Jumlah perlengkapan pegawai perangkat daerah yang disediakan*	*Paket*	-	Rp -
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	Rp -
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan*	*Paket*	5	Rp 78,803,412
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1,246,750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 1,234,850
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 74,487,812
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Rp 1,834,000
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	*Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun*	*Laporan*	14	Rp 27,145,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	Rp 6,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 17,345,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Rp 3,800,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan*	*Unit*	2	Rp 26,073,872
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	Rp -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	Rp 26,073,872
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun*	*Laporan*	24	Rp 29,925,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp 1,125,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 28,800,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*	*Unit*	15	Rp 209,330,100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	Rp 48,075,700
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	Rp 3,014,500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	Rp 7,090,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	Rp 151,149,900
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya efektifitas koordinasi pemerintahan di kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan dikecamatan	%	100	Rp 110,715,200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	*jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor*	*Laporan*	16	Rp 110,715,200
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	8	Rp 95,874,400
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	Rp 14,840,800
Meningkatnya efektifitas koordinasi pelayanan publik di kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi pelayanan publik dikecamatan	%	100	Rp 13,840,800
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	*Jumlah fasilitasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat*	*Laporan*	1	Rp 13,840,800
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	Rp 13,840,800
Meningkatnya efektifitas koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	%	100	Rp 5,545,400
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah fasilitasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum*	*Laporan*	1	Rp 5,545,400
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	Rp 5,545,400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya efektifitas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	%	100	Rp 112,210,600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan*	*Lembaga Kemasyarakatan*	5	Rp 79,238,200

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Lembaga Kemasyarakatan*	5	Rp 79,238,200
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	*Jumlah laporan musyawarah perencanaan pembangunan yang difasilitasi*	*Laporan*	16	Rp 32,972,400
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	16	Rp 32,972,400
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	Rp 102,813,900
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan*	*Orang*	200	Rp 102,813,900
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	Rp 102,813,900
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase tindak lanjut hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	Rp 20,986,200
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	*Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	*Laporan*	4	Rp 20,986,200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	Rp 20,986,200
Meningkatnya efektifitas koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Persentase tindaklanjut hasil koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	%	100	Rp -
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada di kecamatan*	*Laporan*	-	Rp -

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	-	Rp -
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi kelembagaan desa	%	100	Rp 23,556,600
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Administrasi kelembagaan desa	*Jumlah Dokumen Administrasi kelembagaan desa*	*Dokumen*	6	Rp 23,556,600
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	3	Rp 6,170,400
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	3	Rp 17,386,200
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	Rp 32,222,400
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang terfasilitasi*	*Dokumen*	9	Rp 32,222,400
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9	Rp 32,222,400

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	NIHIL					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Sawahan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Sawahan dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk..

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Sawahan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sawahan, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu

indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan Sawahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip- prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Lampiran II
Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/40/411.401/2025
Tanggal 30 Juli 2025

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL REVIU APIP TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KECAMATAN SAWAHAN

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Merubah uraian tema pembangunan pada sub bab 2.4 menjadi "Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik" sesuai dengan tema yang tercantum pada dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026	✓		Sudah merubah uraian tema pembangunan pada sub bab 2.4 menjadi "Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik" sesuai dengan tema yang tercantum pada dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026
2	Memasukkan uraian telaahan terkait kebijakan nasional pada Sub bab 3.1 Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Analisa terkait Kebijakan Nasional bisa berpedoman Asta Cita yaitu delapan prioritas nasional.	✓		Uraian telaahan terkait kebijakan nasional pada Sub bab 3.1 Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sudah dimasukkan

Nganjuk, 30 Juli 2025
Camat Sawahan

Imam Baidowi, S.Sos
Pembina
NIP. 19690715 199202 1 002